

Peraturan Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan
Nomor: P.2/PKTL/SETDIT/KEU.1/2017

PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2017

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
NOMOR : P.2/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2017

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong keberhasilan capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 serta DIPA RKA-K/L Tahun Anggaran 2017, maka seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan wajib membuat perjanjian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

- Mengingat :
1. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 77/M Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.173/Menlhk-II/2015 Tentang Penunjukan Unit Induk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.11/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2017 Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pasal 1 menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2017.

Pasal 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan agar ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang :

- a. Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon III dibawahnya dan Eselon III dengan Eselon IV dibawahnya;
- b. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dengan Eselon IV dibawahnya.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Memerintahkan Eselon II dan Eselon III serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana Pasal 3 dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Penanggung Jawab Program;
- (2) Format pernyataan dan matriks Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana lampiran II.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN KERJASAMA TEKNIK,


ENDI SUGANDI, SH.,MH.,
NIP. 19651123 199803 1 005

SAN AFRI AWANG
NIP. 19570410 198903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
NIP. 19581030 198203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	- Dokumen rencana dan anggaran bidang PKTL	4 Dokumen
		- Laporan monev dan pelaporan pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja bidang PKTL	6 Dokumen
		- Dokumen data dan informasi, statistik dan kehumasan PKTL	3 Dokumen
2.	Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	- Laporan analisis jabatan Ditjen PKTL	1 Dokumen
		- Dokumen pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	1 Dokumen
		- Dokumen pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan peningkatan kualitas SDM	1 Dokumen
3.	Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penangan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	- Draft peraturan perundang-undangan bidang PKTL	5 Draft
		- Laporan penanganan permasalahan hukum bidang PKTL	1 Dokumen
		- Laporan pengembangan dan pemantauan kerjasama teknik bidang PKTL	2 Dokumen
4.	Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	- Tersusunnya laporan SIMAK-BMN	2 Dokumen
		- Laporan Keuangan Ditjen PKTL	3 Dokumen
		- Sistem digital naskah dinas, layanan penataan usaha dan persuratan	5 Dokumen
		- Laporan penyusunan tindak lanjut LHP	1 Dokumen

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan
6.	Layanan Perkantoran	- Layanan Perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Anggaran

Rp. 63.990.308.000,- (*enam puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah*).

Jakarta,

2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Sekretaris Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan,

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
NIP. 19581030 198203 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
Jabatan : Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
NIP. 19600411 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan Diproses Penerbitan Izinnya Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan Diproses Penerbitan Izinnya Sesuai Peraturan Yang Berlaku	100 %
2.	KPH Yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH Yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	100 KPH
3.	Provinsi Yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Yang Terupdate Setiap Tahun	Jumlah Provinsi Yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Yang Terupdate Setiap Tahun	34 Provinsi
4.	KPH Terintegrasi Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah KPH Terintegrasi Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	100 KPH
5.	KPH Terintegrasi Dalam RKTN, RKTP dan RKTG	Seluruh KPH Terintegrasi Dalam RKTN, RKTP dan RKTG	100 KPH
6.	Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen
7.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 1.189.494.000,- (*satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- Rp. 25.621.835.000,- (*dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- Rp. 26.811.329.000,- (*dua puluh enam milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
 NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta, 2017

Direktur Rencana, Penggunaan dan
 Pembentukan Wilayah Pengelolaan
 Hutan,



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
 NIP. 19600411 198703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Muhammad Said, MM
Jabatan : Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Muhammad Said, M.M.
NIP. 196303 18198905 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya Penetapan Kawasan Hutan Sebesar Minimal 80% dari Kawasan Hutan	Kawasan Hutan yang telah selesai ditetapkan	85 % (10 % di tahun 2017)
2.	Tersedianya Arahkan Kawasan Hutan yang Dicadangkan Untuk Pencetakan Sawah Baru dan Areal Pangan Lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1.000.000 Hektar
3.	Teridentifikasinya Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	4.100.000 Hektar
4.	Tersedianya dan Tersosialisasikannya Informasi Batas Kawasan Hutan Kepada Publik	Data dan Informasi Batas Kawasan Hutan Tersedia dan Tersosialisasikan Kepada Publik	6 Lokasi
5.	Terselesaikannya Seluruh Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Termasuk Untuk/Pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	Draft SK Menteri Tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Bagi Permohonan yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan Yang berlaku Termasuk Pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	100 %
6.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	Layanan Internal (Overhead) : (Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	2 Layanan
7.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 1.671.649.000,- (*satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
- Rp. 5.820.593.000,- (*lima milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
- Rp. 7.492.242.000,- (*tujuh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

Jakarta,

2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Direktur Penguatan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan,

Ir. Muhammad Said, MM
NIP. 196303 18198905 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
NIP. 19690205 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir Layan dan Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	Jumlah KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir Layan dan Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	2 KLHS
2.	KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung Daya Tampung	Jumlah KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung Daya Tampung	10 KLHS
3.	KLHS Yang Terreview Kelayakannya	Jumlah KLHS Yang Terreview Kelayakannya	15 KLHS
4.	RPPLH Nasional Yang Tersusun (1 RPPLH Basional), Jumlah Reviu RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional, 1 Dokumen Reviu 5 Tahunan)	Jumlah RPPLH Nasional Yang Tersusun (1 RPPLH Basional), Jumlah Reviu RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional, 1 Dokumen Reviu 5 Tahunan)	1 Dokumen
5.	RPPLH Provinsi Yang Tersusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah Daerah)	Jumlah RPPLH Provinsi Yang Tersusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah Daerah)	5 Dokumen
6.	RPPLH Kab/Kota Yang Tersusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah Daerah)	Jumlah RPPLH Kab/Kota Yang Tersusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah Daerah)	10 Dokumen
7.	Penetapan Indeksasi Daya Dukung Nasional Dengan Pendekatan Jasa Ekosistem Pada Setiap Ekoregion	Jumlah Penetapan Indeksasi Daya Dukung Nasional Dengan Pendekatan Jasa Ekosistem Pada Setiap Ekoregion	1 Indek
8.	Satuan Peta Ekoregion Pada Skala 1 : 250.000	Jumlah Satuan Peta Ekoregion Pada Skala 1 : 250.000	9 Satuan Peta
9.	Prov/Kab. Yang Memiliki Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab. Yang Memiliki Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 Dokumen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	Layanan Internal (Overhead) : (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	1 Layanan
11.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 808.166.000,- (*delapan ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- Rp. 3.073.566.000,- (*tiga milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- Rp. 3.881.732.000,- (*tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

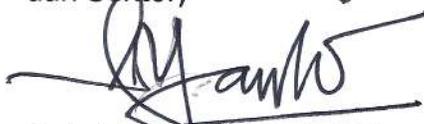
Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta, 2017

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah
dan Sektor,



Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
NIP. 19690205 199503 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ary Sudijanto, MSE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Permohonan Penilaian Dokumen Lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%)	Seluruh Permohonan Penilaian Dokumen Lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%)	50 Dokumen
2.	Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Yang efektif Untuk mendukung Proses Pengambilan Keputusan Yang Berkualitas (100%)	Tersedianya Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Yang efektif Untuk mendukung Proses Pengambilan Keputusan Yang Berkualitas (100%)	1 Dokumen
3.	KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL UPL Daerah Yang Melakukan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Sesuai Dengan NSPK (250 Daerah)	Jumlah KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL UPL Daerah Yang Melakukan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Sesuai Dengan NSPK (250 Daerah)	50 Lembaga
4.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	Layanan Internal (Overhead) : (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	1 Layanan
5.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Jumlah

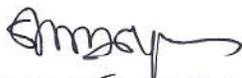
Anggaran

- Rp. 905.953.000,- (*sembilan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
- Rp. 2.944.123.000,- (*dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
- Rp. 3.850.076.000,- (*tiga milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Jakarta,

2017

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
 NIP. 19570410 198903 1 002

Direktur Pencegahan Dampak
 Lingkungan Usaha dan Kegiatan,



Ir. Ary Sudijanto, MSE.
 NIP. 19681011 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
Jabatan : Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
NIP. 19620310 198802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Data dan Peta SDH Nasional	Penyediaan data dan peta sumber daya hutan nasional	34 Provinsi
2.	KPH yang Yang Telah Memiliki Data dan Informasi potensi Sumber Daya Hutan	Jumlah KPH yang Yang Telah Memiliki Data dan Informasi potensi Sumber Daya Hutan	100 KPH
3.	Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	Tersedianya Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	34 Provinsi
4.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Perangkat pengolahan Data dan Komunikasi)	Layanan Internal (Overhead) : (Perangkat pengolahan Data dan Komunikasi)	1 Layanan
5.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

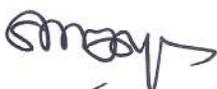
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 1.163.525.000,- (*satu milyar seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- Rp. 3.625.508.000,- (*tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
- Rp. 4.789.033.000,- (*empat milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta,

2017

Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan,



Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Lontas Jonner Sirait
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Ir. Lontas Jonner Sirait
NIP. 19620416 198901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	402 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	3 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
5.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	Layanan Internal (Overhead) : (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	1 Layanan
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 9.354.745.000,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- Rp. 4.640.841.000,- (*empat milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- Rp. 13.995.586.000,- (*tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta,

2017

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah I Medan,



Ir. Lontas Jonner Sirait
NIP. 19620416 198901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Agus Setyadi
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II
Palembang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Agus Setyadi
NIP. 19590810 198901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	150 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	2 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 7.972.850.000,- (*tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Rp. 3.018.462.000,- (*tiga milyar delapan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- Rp. 10.991.312.000,- (*sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah*)

Jakarta, 2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah II Palembang,



Ir. Agus Setyadi
NIP. 19590810 198901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Yopie, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III
Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Yopie, M.P.
NIP. 19620620 199403 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	297 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	2 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	5 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

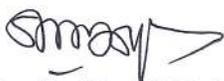
Anggaran

- Rp. 6.848.473.000,- (*enam milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- Rp. 4.810.933.000,- (*empat milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- Rp. 11.659.406.000,- (*sebelas milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah*).

Jumlah

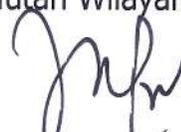
Jakarta, 2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah III Pontianak,



Ir. Yopie, M.P.
NIP. 19620620 199403 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Maryuna Pabutungan, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Maryuna Pabutungan, M.P.
NIP. 19670919 199303 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV SAMARINDA**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	250 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	2 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	7 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 8.270.757.000,- (*delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Rp. 4.970.089.000,- (*empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- Rp. 13.240.846.000,- (*tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta, 2017

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah IV Samarinda,



Ir. Maryuna Pabutungan, M.P.
NIP. 19670919 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Farhanah, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V
Banjarbaru

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Farhanah, M.P.
NIP. 19610417 198903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V BANJARBARU

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	132 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	1 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Layanan Internal (Overhead) : Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Layanan Internal (Overhead) : (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	2 Layanan
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

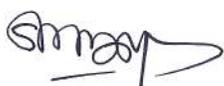
Anggaran

- Rp. 9.174.227.000,- (*sembilan milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- Rp. 2.719.172.000,- (*dua milyar tujuh ratus sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
- Rp. 11.893.399.000,- (*sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).

Jakarta,

2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah V Banjarbaru,



Ir. Farhanah, M.P.
NIP. 19610417 198903 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Zahari H. Sipayung, M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI
Manado

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Zahari H. Sipayung, M.Si.
NIP. 19600512 198903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	288 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	1 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi)	Layanan Internal (Overhead) : (Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi)	2 Layanan
7.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 7.734.462.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- Rp. 4.517.335.000,- (*empat milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- Rp. 12.251.797.000,- (*dua belas milyar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

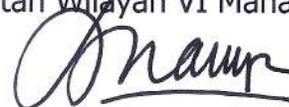
Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta, 2017

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VI Manado,



Ir. Zahari H. Sipayung, M.Si.
NIP. 19600512 198903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Hasbi Afkar
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII
Makassar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Hasbi Afkar
NIP. 19610316 198603 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	168 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	4 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	5 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 9.052.113.000,- (*sembilan milyar lima puluh dua juta seratus tiga belas ribu rupiah*).
- Rp. 4.893.137.000,- (*empat milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- Rp. 13.945.250.000,- (*tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta,

2017

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VII Makassar,



Ir. Hasbi Afkar
NIP. 19610316 198603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Syafri, M.M.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII
Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Ir. Syafri, M.M.
NIP. 19631231 198903 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	12 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	2 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	Layanan Internal (Overhead) : (Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	2 Layanan
7.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

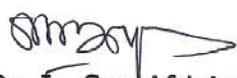
Anggaran

- Rp. 7.482.453.000,- (*tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
- Rp. 3.650.269.000,- (*tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- Rp. 11.132.722.000,- (*sebelas milyar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*).

Jakarta,

2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VIII Denpasar,



Ir. Syafri, M.M.
NIP. 19631231 198903 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tarticius Kustanto
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Drs. Tarticius Kustanto
NIP. 19640712 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	77 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	2 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	Layanan Internal (Overhead) : (Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	2 Layanan
7.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 6.920.096.000,- (*enam milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- Rp. 3.443.266.000,- (*tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- Rp. 10.363.362.000,- (*sepuluh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

Jakarta,

2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah IX Ambon,



Drs. Tarticius Kustanto
NIP. 19640712 199203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahman Panjaitan, S.P., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X
Jayapura

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Rahman Panjaitan, S.P., M.Si.
NIP. 19620526 198602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	109 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	2 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	8 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 7.097.339.000,- (*tujuh milyar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- Rp. 4.423.363.000,- (*empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
- Rp. 11.520.702.000,- (*sebelas milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah*).

Jakarta,

2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah X Jayapura,



Rahman Panjaitan, S.P., M.Si.
NIP. 19620526 198602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Heryadi, M.M.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI
Yogyakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Heryadi, M.M.
NIP. 19630415 199003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI YOGYAKARTA

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	7,5 Km
2.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
3.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
5.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 9.168.064.000,- (*sembilan milyar seratus enam puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah*).
- Rp. 2.047.359.000,- (*dua milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- Rp. 11.215.453.000,- (*sebelas milyar dua ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

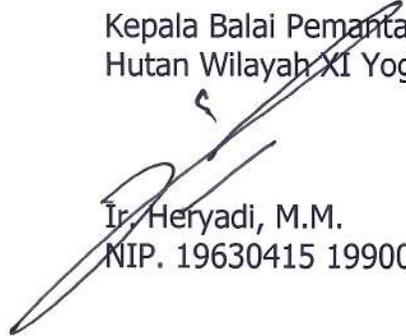
Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
 NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta, 2017

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XI Yogyakarta,



Ir. Heryadi, M.M.

NIP. 19630415 199003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Tridjoko
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII
Tanjung Pinang.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Tridjoko
NIP. 19640403 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNG PINANG

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	300 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	1 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	Layanan Internal (Overhead) : (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	1 Layanan
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 4.223.449.000,- (*empat milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
- Rp. 3.705.127.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- Rp. 7.928.576.000,- (*tujuh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta,

2017

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang,



Ir. Tridjoko
NIP. 19640403 199203 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhendro A. Basori, S.Hut.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII
Pangkal Pinang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Suhendro A. Basori, S.Hut.
NIP. 19690416 199403 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII PANGKAL PINANG

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	84 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	2 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	3 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	Layanan Internal (Overhead) : (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	2 Layanan
7.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

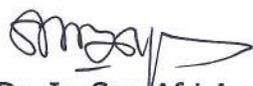
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 4.083.515.000,- (*empat milyar delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah*).
- Rp. 2.981.469.000,- (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- Rp. 7.065.084.000,- (*tujuh milyar enam puluh lima juta delapan puluh empat ribu rupiah*).

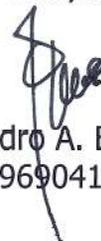
Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta, 2017

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang,



Suhendro A. Basori, S.Hut.
NIP. 19690416 199403 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FX. Herwirawan, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV
Kupang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

FX. Herwirawan, S.Hut., M.Si.
NIP. 19700405 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	128 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	1 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 4.681.185.000,- (*empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- Rp. 3.112.602.000,- (*tiga milyar seratus dua belas juta enam ratus dua ribu rupiah*).
- Rp. 7.793.787.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

Jakarta,

2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. If. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XIV Kupang,



FX. Herwirawan, S.Hut., M.Si.
NIP. 19700405 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV
Gorontalo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19741024 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	22 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	1 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 4.004.021.000,- (*empat milyar empat juta dua puluh satu ribu rupiah*).
- Rp. 2.971.546.000,- (*dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- Rp. 6.975.567.000,- (*enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
 NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta, 2017

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XV Gorontalo,



Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
 NIP. 19741024 200003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731011 199803 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	200 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	2 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	5 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	Layanan Internal (Overhead) : (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	1 Layanan
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 5.090.109.000,- (*lima milyar sembilan puluh juta seratus sembilan ribu rupiah*).
- Rp. 4.878.895.000,- (*empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- Rp. 9.969.004.000,- (*sembilan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ribu rupiah*).

Jakarta,

2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XVI Palu,



Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731011 199803 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Arnold Manting
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII
Manokwari

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Arnold Manting
NIP. 19650430 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII MANOKWARI

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	231 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	3 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	6 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 5.678.904.000,- (*lima milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah*).
- Rp. 5.839.431.000,- (*lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
- Rp. 11.518.335.000,- (*sebelas milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Jakarta,

2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XVII Manokwari,



Ir. Arnold Manting
NIP. 19650430 199203 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Uly Budiwanto, M.M.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII
Banda Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Uly Budiwanto, M.M.
NIP. 19600808 198903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	187 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	1 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, dan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan)	Layanan Internal (Overhead) : (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, dan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan)	2 Layanan
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

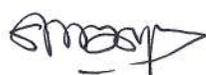
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 3.288.812.000,- (*tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*).
- Rp. 2.646.515.000,- (*dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah*).
- Rp. 5.935.327.000,- (*lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
 NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta,

2017

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh,



Ir. Uly Budiwanto, M.M.
 NIP. 19600808 198903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sigid Darussalam, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX
Pekanbaru

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Sigid Darussalam, M.P.
NIP. 19610409 198903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX PEKANBARU

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	173 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	3 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

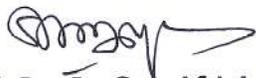
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 4.295.347.000,- (*empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
- Rp. 3.650.514.000,- (*tiga milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah*).
- Rp. 7.945.861.000,- (*tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta,

2017

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XIX Pekanbaru,



Ir. Sigid Darussalam, M.P.
NIP. 19610409 198903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Subardja, M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX
Bandar Lampung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ir. Subardja, M.Si.
NIP. 19610214 198901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	82 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	1 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Internal (Overhead) : (Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	Layanan Internal (Overhead) : (Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	2 Layanan
7.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 5.506.739.000,- (*lima milyar lima ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- Rp. 3.711.716.000,- (*tiga milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*).
- Rp. 9.218.455.000,- (*sembilan milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Jakarta,

2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XX Bandar Lampung,



Ir. Subardja, M.Si
NIP. 19610214 198901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI
Palangkaraya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	388 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	1 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

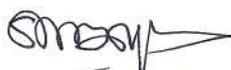
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 3.760.586.000,- (*tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
- Rp. 4.420.395.000,- (*empat milyar empat ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- Rp. 8.180.981.000,- (*delapan milyar seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,

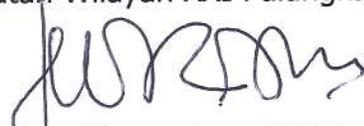


Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
 NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta,

2017

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XXI Palangkaraya,



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
 NIP. 19730523 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Prasetia, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII
Kendari

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Pihak Pertama,

Ari Prasetia, S.H., M.Hum.
NIP. 19680701 199403 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII KENDARI

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	218 Km
2.	Terselesaikannya Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	4 KPH
3.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya	4 Klaster
4.	Layanan Internal Organisasi	Layanan Internal Organisasi	1 Layanan
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Seluruh kegiatan pemantapan kawasan hutan terlaksana dan terkendali	100 %
6.	Layanan Perkantoran	Pelayanan perkantoran	12 Bulan

Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pemantapan Kawasan Hutan

Jumlah

Anggaran

- Rp. 3.523.414.000,- (*tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah*).
- Rp. 4.587.217.000,- (*empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- Rp. 8.110.631.000,- (*delapan milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Jakarta,

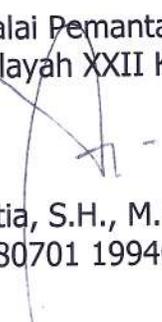
2017

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XXII Kendari,



Ari Prasetia, S.H., M.Hum.
NIP. 19680701 199403 1 005



Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Sd. Manggala Wahana Bakti, Blok I Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Telp. 021-5730289, Fax : 021-5734632, E-mail : paplanologi@menlhk.go.id